



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang, Kode Pos 50144 Telepon 024-7608201
Faksimile: 024-7612344 Laman: <http://pusdataru.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik: pusdataru@jatengprov.go.id - dpusdataru@gmail.com



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP)
TAHUN 2019

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Tahun 2019. LKj-IP Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj-IP adalah wujud pertanggungjawaban Lembaga Pemerintah kepada masyarakat tentang kinerjanya selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj-IP Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang.

Tujuan penyusunan LKj-IP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj-IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKj-IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan pula terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas peran serta bantuan dan kerja sama semua Pejabat dan Staf Dinas Pekerjaan Umum Sumber

Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, sehingga LKj-IP ini dapat tersusun dengan baik disertai doa semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan meridhoi segala upaya kita. Aamiin.

Semarang, 31 Januari 2020

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah**



Ir. SR. EKO YUNIANTO, Sp.1

Pembina Utama Muda
NIP.19640601 199302 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Gambaran Umum Organisasi	4
E. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasaran	5
F. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	11
1. Tujuan	12
2. Sasaran	13
B. Rencana Kinerja & Perjanjian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019	19
A. Pengukuran Pencapaian Sasaran	21
B. Analisis dan Evaluasi Kinerja	23
C. Realisasi Anggaran	30

BAB IV P E N U T U P	53
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	53
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	55

DAFTAR LAMPIRAN

A. PERJANJIAN KINERJA ESELON 2

Perjanjian Kinerja (PK) antara Gubernur Jawa Tengah dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

B. PRESTASI

1. Top 99 Inovasi Pelayan Publik Tahun 2019 (Aplikasi Pembagian Air Irigasi), oleh Kementerian PAN & RB
2. Piagam Penganugerahan Peringkat I KIP Award 2019 sebagai Badan Publik Informatif oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum sub urusan sumber daya air dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Tugas Pokok bidang Sumber Daya Air dan Penataan Ruang tersebut dilaksanakan melalui program - program kegiatan yang meliputi 4 Program Utama, yaitu :

1. Program Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Air Baku.
2. Program Pengelolaan Sungai, Pantai, dan Pengendalian Banjir.
3. Program Pengembangan dan Pembinaan Teknis SDA.
4. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023;
 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2019 adalah agar hasil yang telah dicapai dalam Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Tahun 2019 dapat terpublikasikan secara akuntabel.

Tujuannya antara lain:

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

D. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tugas pokok dan fungsi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

Tugas Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah adalah melaksanakan urusan pemerintah Bidang Pekerjaan Umum sub urusan sumber daya air dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Sedangkan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis, Irigasi dan Air Baku, Sungai, Bendungan dan Pantai serta Penataan Ruang;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis, Irigasi dan Air Baku, Sungai, Bendungan dan Pantai serta Penataan Ruang;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis, Irigasi dan Air Baku, Sungai, Bendungan dan Pantai serta Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

E. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana

a. Susunan kepegawaian :

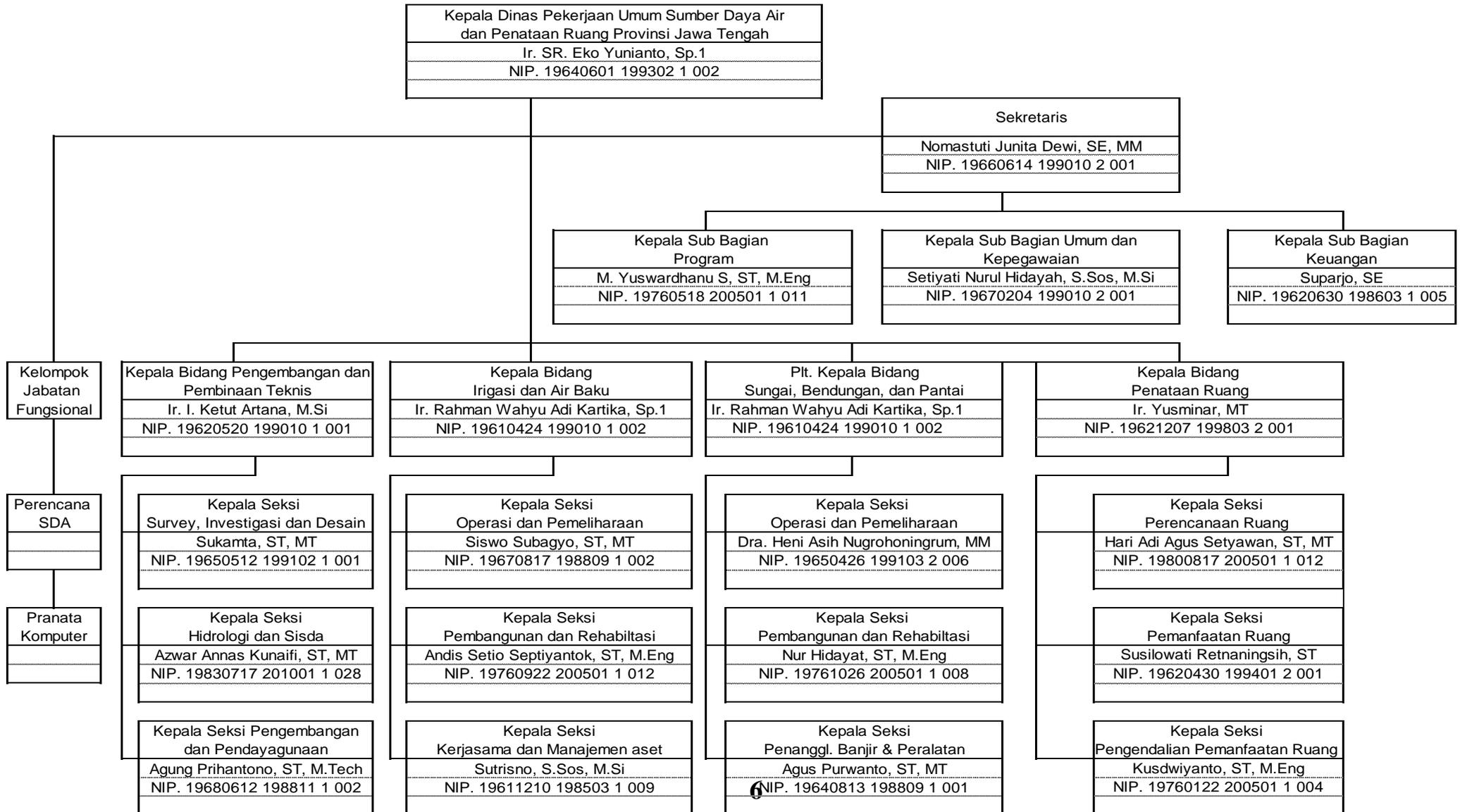
- (1) Kepala Dinas, membawahkan:
 - a) Sekretariat;
 - b) Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis;
 - c) Bidang Irigasi dan Air Baku;
 - d) Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai;
 - e) Bidang Penataan Ruang;
 - f) UPT Dinas;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

b. Sarana dan Prasarana :

- (1) Gedung Kantor
- (2) Peralatan Kerja
- (3) Aset Lainnya

Susunan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 1.1 dan Struktur Organisasi UPTD (Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah) sebagaimana Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 berikut ini :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah :



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah :

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH



F. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Beberapa permasalahan utama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah yang harus segera ditangani diantaranya sebagai berikut :

1. Potensi air belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencukupi kebutuhan air baku untuk mendukung sektor pertanian maupun penyediaan air bersih untuk air minum;
2. Sekitar 80% potensi air permukaan masih terbuang mengalir ke laut, disisi lain kebutuhan air untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk semakin meningkat;
3. Masih terbatasnya kapasitas tampungan air yang telah dibangun untuk mendayagunakan potensi air permukaan yang belum termanfaatkandengan baik;
4. Diperlukan upaya sinkronisasi penanganan sumber air dari hulu sampai dengan hilir serta pengendalian konversi lahan pertanian yang mendorong perubahan fungsi prasarana irigasi, sinergi dengan rencana tata ruang;
5. Masih tingginya kesenjangan kemampuan untuk memberi perhatian kepada kegiatan Operasi Dan Pemeliharaan (OP) sarana prasarana sumber daya air antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Degradasi lingkungan, semakin besarnya rasio Q_{maks} dan Q_{min} ;
7. Semakin berkurangnya kapasitas alur sungai;
8. Semakin meningkatnya kerusakan pantai;
9. Rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada setiap DAS yang seharusnya menurut peraturan perundangan minimal sebesar 30%;
10. Masih tingginya laju perubahan alih fungsi lahan dan kurang taatnya terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena berbagai kepentingan;
11. Potensi terhambatnya pembangunan akibat terjadinya ketidak harmonisan antar sektor;
12. Perwujudan RTR tidak sesuai dengan rencana pembangunan yang pada akhirnya hasil pembangunan akan tidak sesuai dengan RTR;

13. Terjadinya pelanggaran tata ruang & belum tertangani dengan baik;
14. Kesesuaian antara indikasi program dengan RTRW dan RDTR belum optimal;
15. Pelanggaran tata ruang yang diakibatkan masyarakat dan *stakeholders* kurang memahami tentang Rencana Tata Ruang.

G. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Istansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

6. Analisis program/kegiatan yang menunjukkan keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Analisis dan Evaluasi Kinerja

Sub ini menguraikan analisis dari pengukuran kinerja dan hasil evaluasi kinerja dari hasil pengukuran kinerja.

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah 2018-2023.

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 s/d 2023, merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Untuk mewujudkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah tentu perlu mencermati dan penelahaan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang berkaitan dengan bidang sumber daya air dan penataan ruang. Untuk itu keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang dengan Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, dapat dilihat pada Misi ke-3 (tiga) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, dan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018-2023 pada program ke-7 (tujuh) dan ke-8 (delapan) yaitu:

Misi ke-3:

”Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran”

Program unggulan ke-7:

”Pengembangan transportasi massal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi”

Program unggulan ke-8:

”Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi”

Peran Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah dalam ikut mencapai Misi ke-3 (Tiga) dan Program Kerja ke-7 (tujuh) dan ke-8 (delapan) melalui 4 (empat) program, yaitu :

1. Program Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Air Baku;
2. Program Pengelolaan Sungai, Pantai, dan Pengendalian Banjir;
3. Program Pengembangan dan Pembinaan Teknis Sumber Daya Air;
4. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Hasil dari tujuan dan sasaran ini akan menjadi dasar penyusunan kinerja SKPD selama lima tahun. Tujuan yaitu pernyataan yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran yaitu hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Strategi dan Kebijakan merupakan rumusan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pada setiap misi.

1. Tujuan

Guna mewujudkan misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, yaitu

1. Meningkatkan tata kelola organisasi Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.
2. Meningkatkan Pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang.

2. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - Nilai Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - Nilai Sakip PD
3. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Sumber Daya Air, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - Persentase Kualitas sarana dan prasarana sumber daya air.
4. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR), dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.1 berikut :

Tabel II.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola organisasi Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah	Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perkantoran, kepegawaian dan keuangan administrasi pelayanan	Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
	Sasaran 1.2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah
Tujuan2 : Meningkatkan pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	Sasaran 2.1 : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Sumber Daya Air	Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana jaringan irigasi	Meningkatkan kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi dan layanan pemenuhan kebutuhan air baku Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
		Pembinaan, pemantauan & evaluasi kinerja kondisi sarana dan prasarana jaringan irigasi	
		Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan irigasi dan air baku Balai PSDA	
		Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana air baku	
		Pembinaan, pemantauan & evaluasi kinerja kondisi sarana dan prasarana air baku	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
		Peningkatan pengelolaan aset dan fasilitas kerjasama daerah dalam pengelolaan SDA	
		Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sungai dan pantai	Meningkatkan fungsi dan kondisi baik sungai
		Pembinaan, pemantauan & evaluasi kinerja kondisi sarana dan prasarana sungai dan pantai	Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
		Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai dan pantai Balai PSDA Bodri Kuto dan Pemali Comal	
		Pengelolaan banjir dan peralatan	Menurunnya daerah
		Pemeliharaan darurat sarana dan prasarana sungai dan pantai Balai PSDA	genangan banjir Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
		Perencanaan teknis Prasarana dan	Meningkatkan pengembangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
		Sarana SDA	dan pembinaan teknis Sumber Daya Air
		Pengelolaan Hidrologi dan Sistem Informasi SDA	
		Pengembangan dan Pendayagunaan SDA	
	Sasaran 2.2 : Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR).	Menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang	Menciptakan tercapainya tertib ruang dalam pelaksanaan pembangunan daerah

Sumber : Rencana Strategis Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

B. Rencana Kinerja & Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2019 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 6 program (2 program Ex-BAU, 3 Program Teknis dan 1 Program Tata Ruang), 70 kegiatan program Ex-BAU, 35 Kegiatan Teknis dan 10 Kegiatan program tata ruang yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.247.140.729.000,- dan APBN sebesar Rp.95.505.888.000,-

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2019, secara lengkap tercantum pada Tabel II.2 di bawah ini

Tabel II.2 : Perjanjian Kinerja (PK) 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Sumber Daya Air	Persentase Kualitas sarana dan prasarana sumber daya air (%)	53,45 %
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR).	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR (%)	71,75 %
Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat (Angka)	80
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	72

Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)
Program Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Air Baku	Rp. 123.230.122.000,-	APBD
Program Pengelolaan Sungai, Pantai dan Pengendalian Banjir	Rp. 83.898.458.000,-	APBD
Program Pengembangan dan Pembinaan Teknis SDA	Rp. 17.001.269.000,-	APBD
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.	Rp. 3.815.000.000,-	APBD
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 18.220.880.000,-	APBD
Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 975.000.000,-	APBD

Sumber : Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, 2019.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Tujuan dan Sasaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2019 ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
2. Akuntabilitas Keuangan
3. Evaluasi dan Analisis kinerja

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

Tabel III.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2019 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, ada 2 (dua) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada Tahun 2018-2023, sebagaimana tertuang dalam Tabel III.2 :

Tabel III.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
TUJUAN 1		
1. Meningkatkan Pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	Tingkat pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi tingkat pelayanan sarana dan prasarana Sumber Daya Air dan Penataan Ruang di Provinsi Jawa Tengah. • Formulasi Pengukuran : Rata-rata dari (persentase kualitas sarana dan prasarana SDA + persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR). • Tipe Perhitungan : Kumulatif. • Sumber Data : Dinas PU SDA TARU. • Penanggungjawab : Dinas PU SDA TARU.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
SASARAN 1.1		
1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sumber daya air.	Persentase Kualitas sarana dan prasarana sumber daya air.	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kualitas sarana dan prasarana sumber daya air. • Formulasi Pengukuran : Rata-rata dari (Persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi + persentase pemenuhan kebutuhan air baku + persentase sungai dalam kondisi baik + persentase luas daerah bebas genangan banjir). • Tipe Perhitungan : Komulatif. • Sumber Data : Dinas PU SDA TARU. • Penanggungjawab : Dinas PU SDA TARU.
SASARAN 1.2		
2. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR).	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR). • Formulasi Pengukuran : $\frac{\sum \text{pemanfaatan ruang yg sesuai RTR}}{\sum \text{pemanfaatan ruang}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan : Komulatif. • Sumber Data : Dinas PU SDA TARU. • Penanggungjawab : Dinas PU SDA TARU.

Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2019

Adapun untuk hasil pengukuran kinerja pada masing-masing sasaran strategis berdasarkan pada target dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana disajikan pada uraian di bawah ini:

A. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Hingga akhir tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dari hasil pengukuran pencapaian sasaran, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah berhasil mencapai 100%

dari target sasaran yang ditetapkan. Adapun tujuan capaian sasaran seluruhnya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Sumber Daya Air;
2. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR).

Untuk mengatur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel III.3
Pengukuran Sasaran Strategis Dinas PU SDA TARU
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun seblmnya	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(5)
1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Sumber Daya Air	Persentase kualitas Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	53,45%	53,45%	100,00	100,00
2. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR).	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR	71,75 %	71,75%	100,00	100,00
3. Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat (Angka)	80	80	100,00	100,00
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	72	72	100,00	100,00

Sumber: e controlling Kinerja Dinas PU SDA TARU Prov Jateng TA. 2019

B. Analisis dan Evaluasi Kinerja

a. Sasaran-1 : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Sumber Daya Air

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **Sasaran-1**, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

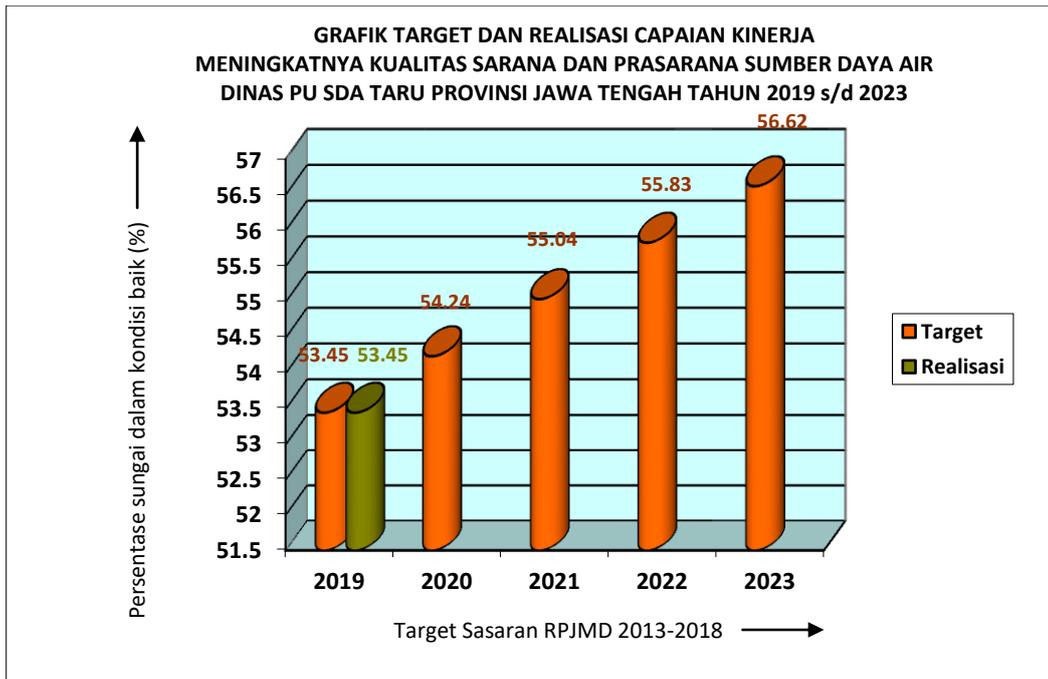
Tabel III.4 Realisasi Sasaran-1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Real	%	% Capaian Tahun seblmnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	53,45%	53,45%	100,00	100,00
Rata-rata capaian sasaran 1				100,00	100,00

Sumber: e controlling Kinerja Dinas PU SDA TARU Prov Jateng TA. 2019

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran-1**, dari indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, atau dapat dikategorikan **Baik**.

Dari hasil pengukuran kinerja **Sasaran-1** dapat dilihat pada gambar grafik Target dan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan lima tahun ke depan pada masing-masing sasaran sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana pada Gambar 3.1 di bawah ini.



Sumber: Analisis 2019

Gambar 3.1

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian **Sasaran 1** (Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air), adalah sebesar Rp. 196.065.078.903,- atau 92,89% dari total pagu sebesar Rp.211.076.144.000,-. Hal ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,11% dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian **Sasaran 1** (Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air), sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan Program Pengembangan Dan Pembinaan Teknis SDA, Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku, Pengelolaan Sungai, Pantai, Dan Pengendalian Banjir, dengan kegiatan-kegiatan diantaranya sebagai berikut :

- a). Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana SDA;
- b). Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Sistem Informasi SDA;
- c). Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan SDA;
- d). Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi;
- e). Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku;
- f). Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Irigasi;

- g). Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Air Baku
- h). Kerjasama dan Manajemen Aset dalam Pengelolaan SDA
- i). Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai
- j). Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai
- k). Pengendalian Banjir dan Pengelolaan Peralatan
- l). Kegiatan pendukung lainnya.

PEKERJAAN PEMBANGUNAN EMBUNG KEBASEN TEGAL



GAMBAR 3.2

PEKERJAAN PERKUATAN TEBING SUNGAI PEMALI DS. LANGKAP KAB. BREBES



GAMBAR 3.3

b. Sasaran- 2 : Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **Sasaran-2**, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

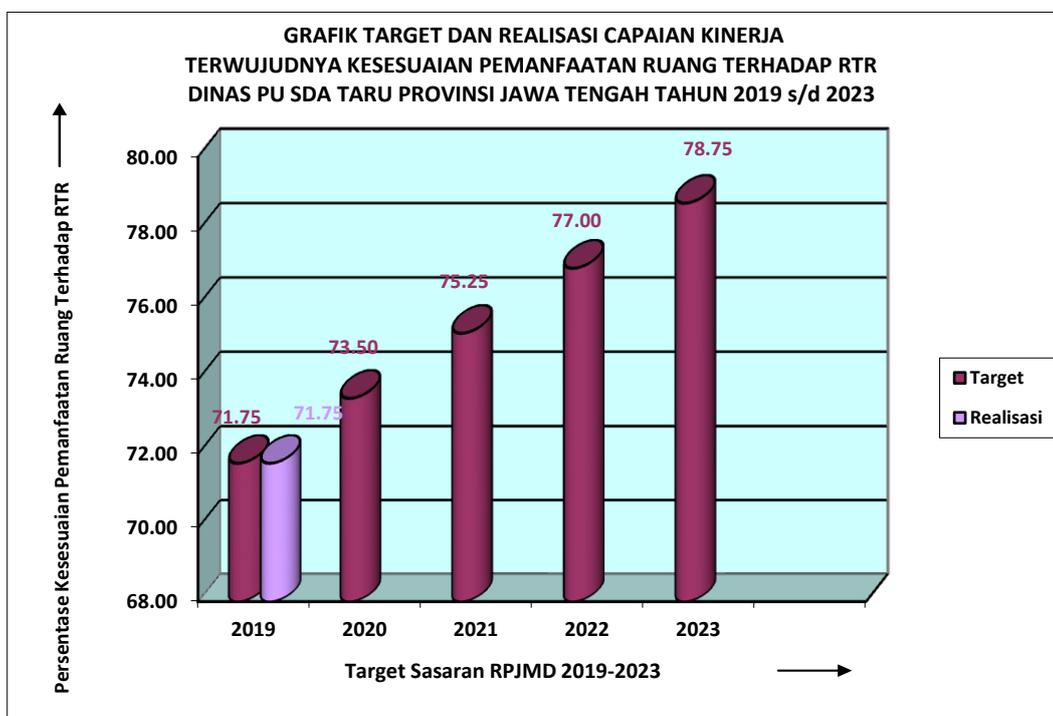
Tabel III.5 Realisasi Sasaran-2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Real	%	% Capaian Tahun seblmnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR).	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR	71,75 %	71,75 %	100,00	100,00
Rata-rata capaian sasaran 2				100,00	100,00

Sumber: e controlling Kinerja Dinas PU SDA TARU Prov Jateng TA. 2019

Hasil pengukuran kinerja **sasaran-2**, dari indikator kinerja sebagai tolok ukurnya menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, atau dapat dikategorikan **Baik**.

Dari hasil pengukuran kinerja **Sasaran-2** dapat dilihat pada gambar grafik Target dan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan lima tahun ke depan pada masing-masing sasaran sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana pada Gambar 3.2 di bawah ini.



Sumber: Analisis 2019

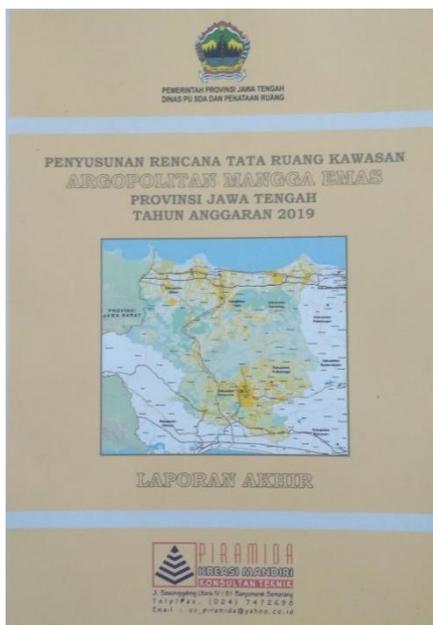
Gambar 3.2
26

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian **Sasaran 2** (Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR), adalah sebesar Rp. 3.645.130.385,- atau 92,94% dari total pagu sebesar Rp.3.815.000.000,-. Hal ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,06% dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian **Sasaran 2** (Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR), sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan kegiatan-kegiatan diantaranya sebagai berikut :

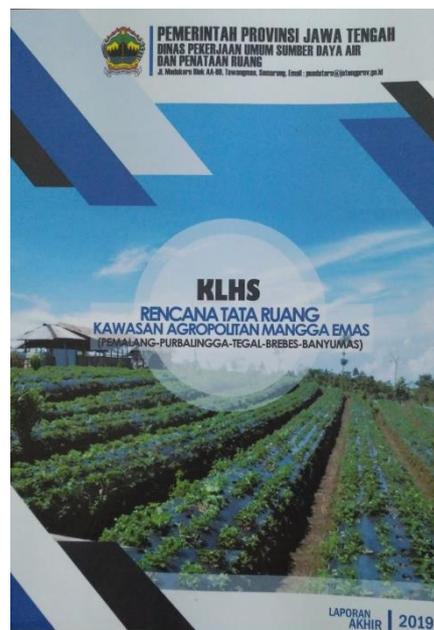
- a). Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah;
- b). Pembinaan Penyusunan/ Review Rencana Tata Ruang Kab/Kota;
- c). Optimalisasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
- d). Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- e). Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai (6 balai);
- f). Kegiatan pendukung lainnya.

Laporan Akhir Penyusunan RTR Kawasan Argopolitan Mangga Emas Prov.



Sumber: Laporan Akhir Tahun
Bidang Penataan Ruang 2019

Laporan Akhir KLHS RTR Kawasan Argopolitan Mangga Emas TA. 2019



Sumber: Laporan Akhir Tahun
Bidang Penataan Ruang 2019

c. Sasaran-3 : Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **Sasaran-3**, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.6 Realisasi Sasaran-3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Real	%	% Capaian Tahun seblmnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat (Angka)	80	80	100,00	100,00
Rata-rata capaian sasaran 3				100,00	100,00

Sumber: e controlling Kinerja Dinas PU SDA TARU Prov Jateng TA. 2019

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran-3**, dari indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, atau dapat dikategorikan **Baik**.

d. Sasaran-4 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **Sasaran-4**, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

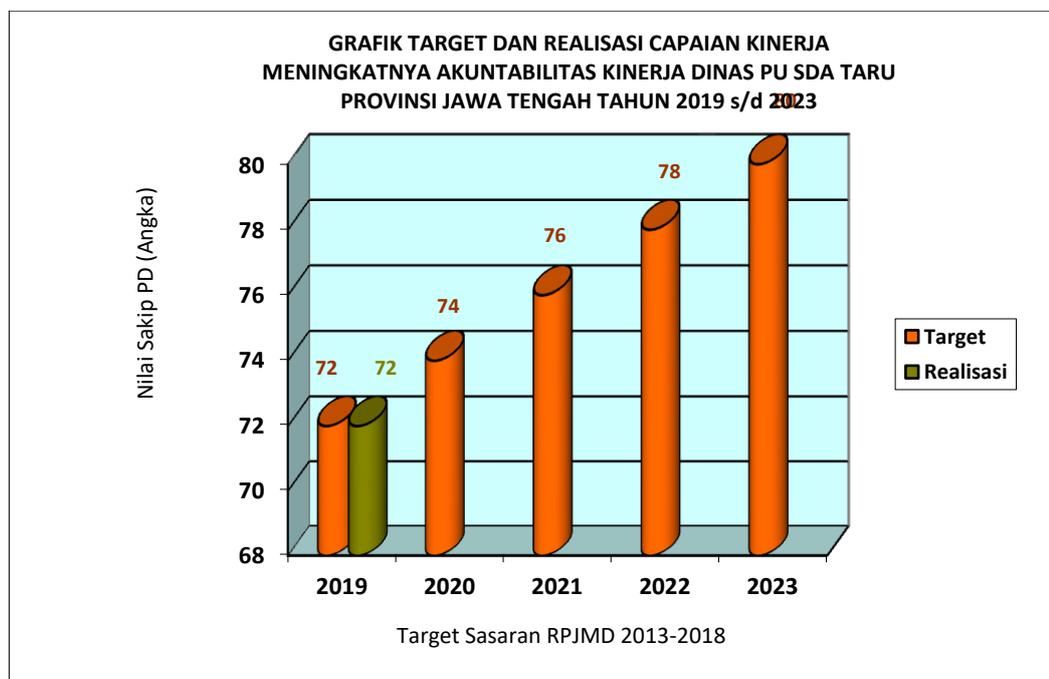
Tabel III.7 Realisasi Sasaran-4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Real	%	% Capaian Tahun seblmnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	72	72	100,00	100,00
Rata-rata capaian sasaran 3				100,00	100,00

Sumber: e controlling Kinerja Dinas PU SDA TARU Prov Jateng TA. 2019

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran-4**, dari indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, atau dapat dikategorikan **Baik**.

Dari hasil pengukuran kinerja **Sasaran-2** dapat dilihat pada gambar grafik Target dan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan lima tahun ke depan pada masing-masing sasaran sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana pada Gambar 3.3 di bawah ini.



Sumber: Analisis 2019

Gambar 3.3

C. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2019, besarnya anggaran yang dikelola yaitu :

a. Target Pendapatan

Pada tahun 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan sebanyak **Rp.4.700.000.000,-**, pendapatan yang diperoleh sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebesar **Rp.4.283.617.818,-** atau dicapai sebesar **91,14%**. Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel 3.8:

Tabel III.8 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2019

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI (Rp)	SELISIH	
				(Rp)	%
1	Pemakaian Tanah	2.497.000.000	2.504.496.258	7.496.258	0,30
2	Pemakaian Bangunan/Saluran Pengairan	227.800.000	223.859.060	-3.940.940	-1,73
3	Sewa Alat Berat	1.820.000.000	1.422.075.000	-397.925.000	-21,86
4	Sewa Ruangan	40.000.000	0	-40.000.000	-100,00
5	Sewa Rumah Dinas.	91.720.000	122.212.500	30.492.500	33,25
6	Sewa Lapangan Tennis	7.580.000	5.300.000	-2.280.000	-30,08
7	Sewa Kantin	15.900.000	5.675.000	-10.225.000	-64,31
8	Lain - Lain PAD Yang Sah	0	0	0	0
	Tahun 2019	4.700.000.000	4.283.617.818	-416.382.182	-8,86
	Tahun 2018	4.417.700.000	4.087.067.916	-330.632.084	-7,48
	Selisih	282.300.000	196.549.902	3.260.792	0,07

Sumber: Laporan Pengendalian Kegiatan APBD & APBN TA. 2019 s/d Akhir Desember Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.

Apabila dibandingkan antara Tahun 2019 dan 2018, dengan melihat tabel tersebut maka dapat dikatakan bahwa realisasi pendapatan tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 196.549.902,-, sedangkan realisasi pendapatan tahun 2019 masih dibawah target yang dikarenakan antara lain :

- Tidak tercapainya Sewa Alat Berat dikarenakan usia alat berat yang dimiliki dinilai cukup tua sehingga kalah saing dengan kompetitor.
- Tidak tercapainya target Sewa Lap.Tenis dan Sewa Kantin, dikarenakan penyewa membayar sewabelum tepat waktu.
- Tidak Tercapainya Sewa Ruangan dikarenakan penyewa membayar sewa belum tepat waktu.

b. Pelaksanaan APBD dan APBN Tahun 2019

Pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung dengan Anggaran sebesar **Rp.329.476.617.000,-**. Anggaran tersebut bersumber dari APBD (termasuk DAK) sebesar **Rp.233.970.729.000,-** dan APBN (Tugas Pembantuan) sebesar **Rp.95.505.888.000,-**, dalam realisasinya dari anggaran APBD terserap sebanyak **Rp. 217.882.519.850,-** atau **93,12%**, sehingga terdapat efisiensi/Silpa Anggaran APBD sebesar **Rp.27.375.775.493,-** atau **6,88%** dan realisasi anggaran APBN terserap sebanyak **Rp.91.349.224.263,-** atau **95,65%**, sehingga terdapat efisiensi/Silpa Anggaran APBN sebesar **Rp. 4.156.663.737,-** atau **4,35%**. Adapun hasilrealisasi anggaran belanja untuk APBD dan APBN selengkapnya dapat dilihat pada tabel III.9 dan III.10

Tabel III.9 Anggaran dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2019

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%	EFISIENSI (%)
APBD PROVINSI								
I	EX BAU	PROGRAM MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		18.104.585.000	17.198.931.737	905.653.263	95,00	5,00
			1 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	1.317.133.000	1.226.228.750	90.904.250	93,10	6,90
			2 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah PEMALI COMAL	48.712.000	48.287.000	425.000	99,13	0,87
			3 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Bodri Kuto	49.987.000	49.662.300	324.700	99,35	0,65
			4 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Seluna	48.660.000	48.637.750	22.250	99,95	0,05
			5 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah B. Solo	46.487.000	46.151.800	335.200	99,28	0,72
			6 Kegiatan	42.358.000	42.267.750	90.250		

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM		NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%	EFISIENSI (%)
				Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Probolo				99,79	0,21
			7	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Sercit	50.700.000	50.485.800	214.200	99,58	0,42
			8	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah SEKRETARIAT	305.000.000	282.958.650	22.041.350	92,77	7,23
			9	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	182.266.000	155.110.189	27.155.811	85,10	14,90
			10	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	151.804.000	146.416.704	5.387.296	96,45	3,55
			11	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	138.240.000	134.338.479	3.901.521	97,18	2,82
			12	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air	154.000.000	116.360.394	37.639.606	75,56	24,44

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM		NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%	EFISIENSI (%)
				dan Listrik Perangkat Daerah					
			13	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	100.000.000	81.120.022	18.879.978	81,12	18,88
			14	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	129.450.000	94.241.145	35.208.855	72,80	27,20
			15	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	514.048.000	508.723.009	5.324.991	98,96	1,04
			16	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	177.000.000	162.600.000	14.400.000	91,86	8,14
			17	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	34.500.000	34.500.000	-	100,00	-
			18	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	65.400.000	59.136.000	6.264.000	90,42	9,58
			19	Kegiatan Penyediaan Jasa	45.600.000	45.540.000	60.000	99,87	0,13

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM		NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%	EFISIENSI (%)
				Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah					
			20	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	33.000.000	33.000.000	-	100,00	-
			21	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	46.200.000	45.738.000	462.000	99,00	1,00
			22	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	30.000.000	30.000.000	-	100,00	-
			23	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	1.928.680.000	1.812.607.000	116.073.000	93,98	6,02
			24	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	51.750.000	51.696.750	53.250	99,90	0,10
			25	Kegiatan Rapat Koordinasi dan	29.900.000	29.800.000	100.000	99,67	0,33

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM		NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%	EFISIENSI (%)
				Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah					
			26	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	35.000.000	34.847.000	153.000	99,56	0,44
			27	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	50.000.000	49.949.450	50.550	99,90	0,10
			28	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	75.000.000	74.965.598	34.402	99,95	0,05
			29	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	65.000.000	64.897.000	103.000	99,84	0,16
			30	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	546.000.000	531.573.029	14.426.971	97,36	2,64
			31	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	11.500.000	11.472.000	28.000	99,76	0,24
			32	Kegiatan	21.070.000	20.251.000	819.000		

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM		NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%	EFISIENSI (%)
				Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah				96,11	3,89
			33	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	14.500.000	14.490.000	10.000	99,93	0,07
			34	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	10.000.000	9.985.000	15.000	99,85	0,15
			35	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	10.000.000	9.940.000	60.000	99,40	0,60
			36	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12.500.000	12.495.000	5.000	99,96	0,04
			37	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	40.000.000	39.815.000	185.000	99,54	0,46

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM		NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%	EFISIENSI (%)
			38	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	2.300.000	2.300.000	-	100,00	-
			39	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	2.300.000	2.300.000	-	100,00	-
			40	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	-	100,00	-
			41	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	1.440.000	1.068.000	372.000	74,17	25,83
			42	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	2.000.000	1.992.000	8.000	99,60	0,40
			43	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	2.500.000	2.475.000	25.000	99,00	1,00
			44	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	8.500.000	7.820.000	680.000	92,00	8,00

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM		NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%	EFISIENSI (%)
			45	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	1.838.213.000	1.736.372.175	101.840.825	94,46	5,54
			46	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	354.000.000	349.329.865	4.670.135	98,68	1,32
			47	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	470.500.000	463.036.350	7.463.650	98,41	1,59
			48	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah	310.000.000	305.748.050	4.251.950	98,63	1,37

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM		NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%	EFISIENSI (%)
				Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah					
			49	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	371.185.000	366.914.150	4.270.850	98,85	1,15
			50	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	275.000.000	271.336.750	3.663.250	98,67	1,33
			51	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	336.530.000	333.463.600	3.066.400	99,09	0,91

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM		NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%	EFISIENSI (%)
			52	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	435.000.000	421.249.500	13.750.500	96,84	3,16
			53	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	84.525.000	84.107.000	418.000	99,51	0,49
			54	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	145.462.000	142.118.200	3.343.800	97,70	2,30
			55	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	75.300.000	75.253.100	46.900	99,94	0,06
			56	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	59.500.000	59.272.000	228.000	99,62	0,38
			57	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga	58.500.000	58.452.000	48.000	99,92	0,08

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM		NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%	EFISIENSI (%)
				Perangkat Daerah					
			58	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	95.500.000	95.396.600	103.400	99,89	0,11
			59	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.633.180.000	1.623.137.000	10.043.000	99,39	0,61
			60	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	200.000.000	199.000.000	1.000.000	99,50	0,50
			61	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	200.000.000	194.133.000	5.867.000	97,07	2,93
			62	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	200.000.000	198.499.000	1.501.000	99,25	0,75
			63	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	200.000.000	199.092.000	908.000	99,55	0,45
			64	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	200.000.000	197.417.000	2.583.000	98,71	1,29
			65	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	200.000.000	194.974.000	5.026.000	97,49	2,51
			66	Kegiatan Rehab Gedung Kantor	283.705.000	-	283.705.000	-	100,00

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM		NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%	EFISIENSI (%)
				Perangkat Daerah					
			67	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	2.245.000.000	2.215.075.428	29.924.572	98,67	1,33
			68	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	1.200.000.000	1.184.312.400	15.687.600	98,69	1,31
II		PROGRAM PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			975.000.000	973.378.825	1.621.175	99,83	0,17
			69	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	450.000.000	449.683.932	316.068	99,93	0,07
			70	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	525.000.000	523.694.893	1.305.107	99,75	0,25
III	TEKNIS	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN TEKNIK SDA			17.381.269.000	16.417.368.931	963.900.069	94,45	5,55
			71	Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana SDA	10.041.995.000	9.498.896.765	543.098.235	94,59	5,41
			72	Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Sistem Informasi SDA	2.104.374.000	2.084.403.623	19.970.377	99,05	0,95
			73	Kegiatan Pengembangan dan	5.234.900.000	4.834.068.543	400.831.457	92,34	7,66

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM		NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%	EFISIENSI (%)
				Pendayagunaan SDA					
IV		PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI DAN AIR BAKU			112.965.787.000	102.035.860.809	10.929.926.191	90,32	9,68
			74	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi	31.419.240.000	29.118.416.572	2.300.823.428	92,68	7,32
			75	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku	27.435.758.000	25.751.882.030	1.683.875.970	93,86	6,14
			76	Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Irigasi	464.557.000	428.696.325	35.860.675	92,28	7,72
			77	Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Air Baku	243.695.000	240.326.261	3.368.739	98,62	1,38
			78	Kerjasama dan Manajemen Aset dalam Pengelolaan SDA	7.735.000.000	1.920.174.170	5.814.825.830	24,82	75,18
			79	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Pemali Comal	10.282.906.000	10.155.413.879	127.492.121	98,76	1,24

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM		NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%	EFISIENSI (%)
			80	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Bodri Kuto	7.949.750.000	7.663.052.892	286.697.108	96,39	3,61
			81	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Seluna	6.729.012.000	6.657.041.375	71.970.625	98,93	1,07
			82	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Bengawan Solo	11.797.618.000	11.405.407.950	392.210.050	96,68	3,32
			83	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Probolo	3.646.625.000	3.496.234.155	150.390.845	95,88	4,12
			84	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Serayu Citanduy	5.261.626.000	5.199.215.200	62.410.800	98,81	1,19

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM		NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%	EFISIENSI (%)
v		PENGELOLAAN SUNGAI, PANTAI, DAN PENGENDALIAN BANJIR			80.729.088.000	77.611.849.163	3.117.238.837	96,14	3,86
			85	Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai	45.430.284.000	43.032.570.757	2.397.713.243	94,72	5,28
			86	Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai	1.076.825.000	1.046.703.964	30.121.036	97,20	2,80
			87	Pengendalian Banjir dan Pengelolaan Peralatan	9.101.359.000	8.871.975.043	229.383.957	97,48	2,52
			88	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Pemali Comal	4.906.585.000	4.879.330.000	27.255.000	99,44	0,56
			89	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Bodri Kuto	3.521.057.000	3.471.213.124	49.843.876	98,58	1,42
			90	Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Seluna	1.325.320.000	1.317.701.700	7.618.300	99,43	0,57

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM		NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%	EFISIENSI (%)
			91	Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Bengawan Solo	1.366.321.000	1.317.862.550	48.458.450	96,45	3,55
			92	Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Probolo	1.359.237.000	1.355.866.750	3.370.250	99,75	0,25
			93	Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Serayu Citanduy	826.609.000	798.281.400	28.327.600	96,57	3,43
			94	Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Pemali Comal	1.377.589.000	1.360.847.462	16.741.538	98,78	1,22
			95	Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Bodri Kuto	1.446.008.000	1.410.160.634	35.847.366	97,52	2,48
			96	Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Seluna	900.000.000	895.881.025	4.118.975	99,54	0,46

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM		NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%	EFISIENSI (%)
			97	Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Bengawan Solo	1.077.569.000	1.073.645.418	3.923.582	99,64	0,36
			98	Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Probolo	846.869.000	840.413.145	6.455.855	99,24	0,76
			99	Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Serayu Citanduy	1.042.569.000	1.019.601.400	22.967.600	97,80	2,20
			100	Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Pemali Comal	1.000.000.000	942.153.200	57.846.800	94,22	5,78
			101	Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Bodri Kuto	919.985.000	879.266.000	40.719.000	95,57	4,43
			102	Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Seluna	852.484.000	847.998.900	4.485.100	99,47	0,53
			103	Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Bengawan Solo	686.500.000	661.125.500	25.374.500	96,30	3,70
			104	Kegiatan Penanganan	735.931.000	709.775.267	26.155.733	96,45	3,55

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM		NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%	EFISIENSI (%)
				Banjir Balai PSDA Probolo					
			105	Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Serayu Citanduy	929.987.000	879.475.924	50.511.076	94,57	5,43
VI		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			3.815.000.000	3.645.130.385	169.869.615	95,55	4,45
			106	Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah	1.290.000.000	1.237.222.893	52.777.107	95,91	4,09
			107	Pembinaan Penyusunan/ Review Rencana Tata Ruang Kab/Kota	410.000.000	369.436.085	40.563.915	90,11	9,89
			108	Optimalisasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	865.000.000	833.819.628	31.180.372	96,40	3,60
			109	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	550.000.000	522.179.089	27.820.911	94,94	5,06
			110	Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Pemali Comal	150.000.000	149.275.000	725.000	99,52	0,48
			111	Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah	150.000.000	149.441.000	559.000	99,63	0,37

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM		NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%	EFISIENSI (%)
				Balai PSDA Bodri Kuto					
			112	Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Seluna	100.000.000	95.757.200	4.242.800	95,76	4,24
			113	Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	100.000.000	99.681.750	318.250	99,68	0,32
			114	Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Probolo	100.000.000	98.854.940	1.145.060	98,85	1,15
			115	Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	100.000.000	89.462.800	10.537.200	89,46	10,54
				JUMLAH:	233.970.729.000	217.882.519.850	16.088.209.150	93,12	6,88

Sumber: Laporan Pengendalian Kegiatan APBD & APBN TA. 2019 s/d Akhir Desember Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.

Tabel III.10 Anggaran dan Realisasi Anggaran APBNTahun 2019

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBN TA. 2019
SATKER DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
SAMPAI DENGAN AKHIR DESEMBER 2019**

SATKER

No	Program / Kegiatan / Komponen	Pagu Biaya (Rp)			Progres Fisik (%)			Terkontrak		Progres Keuangan					Keterangan / Permasalahan
		PHLN	Rupiah	TOTAL	Target (%)	Real (%)	Deviasi (%)	Rp.	(%)	Target		Realisasi		Deviasi (%)	
										(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
033.06.10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	0	95.505.888.000	95.505.888.000	99,08	99,08	0,00	-	0,00	95.505.888.000	100,00	91.349.224.263	95,65	-4,35	
5300	PRASARANA SDA	0	95.505.888.000	95.505.888.000	99,08	99,08	0,00	-	0,00	95.505.888.000	100,00	91.349.224.263	95,65	-4,35	
5.300.001	JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN KEWENANGAN PUSAT YANG DIOPERASIKAN & DIPELIHARA	0	93.295.658.000	93.295.658.000	99,06	99,06	0,00	-	0,00	93.295.658.000	100,00	89.724.419.793	96,17	-3,83	
5.300.001.001	JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN KEWENANGAN PUSAT YANG DIOPERASIKAN & DIPELIHARA	0	93.295.658.000	93.295.658.000	99,06	99,06	0,00	-	0,00	93.295.658.000	100,00	89.724.419.793	96,17	-3,83	
071	OPERASI RUTIN	0	42.517.464.000	42.517.464.000	100,00	100,00	0,00	0	0,00	42.517.464.000	100,00	41.580.261.400	97,80	-2,20	
092	PEMBINAAN TEKNIS TENAGA OP	0	541.805.000	541.805.000	100,00	100,00	0,00	0	0,00	541.805.000	100,00	473.594.300,00	87,41	-12,59	
094	PEMELIHARAAN BERKALA	0	9.331.604.000	9.331.604.000	90,57	90,57	0,00	0	0,00	9.331.604.000	100,00	6.919.822.205	74,15	-25,85	
095	PEMELIHARAANRUTIN	0	38.911.245.000	38.911.245.000	100,00	100,00	0,00	0	0,00	38.911.245.000	100,00	38.786.285.388	99,68	-0,32	
122	PENYUSUNAN	0	1.993.540.000	1.993.540.000	100,00	100,00	0,00	0	0,00	1.993.540.000	100,00	1.964.456.500	98,54	-1,46	
5.300.951	LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	0	2.210.230.000	2.210.230.000	80,31	80,31	0,00	0	0,00	2.210.230.000	100,00	1.624.804.470	73,51	-26,49	
5.300.951.002	LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	0	1.929.599.000	1.929.599.000	100,00	100,00	0,00	0	0,00	1.929.599.000	100,00	1.344.760.610	69,69	-30,31	
058	DUKUNGAN INTERNAL LAINNYA	0	1.929.599.000	1.929.599.000	100,00	100,00	0,00	0	0,00	1.929.599.000	100,00	1.344.760.610	69,69	-30,31	
	ADMINISTRASI KEGIATAN SATKER	0	1.929.599.000	1.929.599.000	100,00	100,00	0,00	0	0,00	1.929.599.000	100,00	1.344.760.610	69,69	-30,31	
5.300.951.003	SISTEM PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK	0	280.631.000	280.631.000	100,00	100,00	0,00	0	0,00	280.631.000	100,00	280.043.860	99,79	-0,21	
053	MONITORING)	0	280.631.000	280.631.000	100,00	100,00	0,00	0	0,00	280.631.000	100,00	280.043.860	99,79	-0,21	
	E-MONITORING	0	55.000.000	55.000.000	100,00	100,00	0,00	0	0,00	55.000.000	100,00	54.813.250,00	99,66	-0,34	
	PEMANTAUAN & PELAPORAN	0	225.631.000	225.631.000	100,00	100,00	0,00	0	0,00	225.631.000	100,00	225.230.610	99,82	-0,18	

Sumber: Laporan Pengendalian Kegiatan APBD & APBN TA. 2019 s/d Akhir Desember
Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah

BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sumber daya air berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan Baik.

Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran Rata-Rata Pencapaian Keempat Sasaran sebesar **100,00%** (atau dapat dikategorikan **Baik**).
2. Realisasi keuangan Belanja Langsung yang bersumber dari APBD sebesar **Rp.217.882.519.850,- (93,12%)**, dari alokasi anggaran sebesar **Rp.233.970.729.000,-** dan terdapat efisiensi/Silpa Anggaran APBD sebesar **Rp.16.088.209.150,-** atau **6,88%**, sedangkan Realisasi Anggaran yang bersumber dari APBN sebesar **Rp.91.349.224.263,- (95,65%)** dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 95.505.888.000,-** dan terdapat efisiensi/Silpa Anggaran APBN sebesar **Rp. 4.156.663.737,-** atau **4,35%**.
3. Realisasi pendapatan sampai dengan akhir Tahun 2019 sebesar **Rp4.283.617.818,-** dari target pendapatan sebesar **Rp.4.700.000.000,-**

atau tercapai sebesar **91,14%**. capaian pendapatan tahun 2019 ini masih berada dibawah target penerimaan pendapatan. hal ini dipengaruhi faktor-faktor diluar dugaan antara lain :

- Tidak tercapainya Sewa Alat Berat dikarenakan sebagian alat Alat Berat masih dalam perbaikan dan adanya kendala cuaca.
- Tidak Tercapainya Sewa Sal Pengairan. Lap.Tenis. Kantin. Koperasi dan Mess dikarenakan penyewa membayar sewa belum tepat waktu.
- Tidak Tercapainya Sewa Ruangan dikarenakan penyewa membayar sewa belum tepat waktu.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang dilakukan dalam menghadapi masalah tersebut di atas adalah :

1. Perlu diusulkan pembelian alat berat baru untuk mengganti alat berat lama yang telah rusak guna peningkatan Pendapatan Daerah.
2. dalam menyewakan gedung/ruang/aula dan asramadiperlukan promosi-promosi sehingga daya saing dapat meningkat.
3. Perlunya sosialisasi kepada penyewa agar selalu tertib melunasi tunggakan tepat waktu sehingga pendapatan dapat meningkat

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2019 untuk SKPD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019. semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Semarang 31 Januari 2020

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah**



Ir. SR. EKO YUNANTO, Sp.1

Pembina Utama Muda

NIP.19640601 199302 1 002

LAMPIRAN –LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608201
Faksimile 024-7612344 laman : <http://pusdataru.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : pusdataru@jatengprov.go.id dan dpusdataru@gmail.com

2019

PK PERJANJIAN KINERJA DINAS PU SDA TARU PROVINSI JAWA TENGAH





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608201
Faksimile 024-7612344 laman: <http://pusdataru.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : pusdataru@jatengprov.go.id dan dpusdataru@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1

Jabatan : Pit. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai.

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Jabatan : Gubernur Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 7 Februari 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

GUBERNUR JAWA TENGAH

Pit. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH,
KEPALA BIDANG
SUNGAI, BENDUNGAN DAN PANTAI


H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP


Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1
Pemina Tingkat I
NIP. 19640601 199302 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
Tujuan 1			
	Meningkatkan pelayanan Sumber Daya Air dan penataan ruang.	Tingkat pelayanan Sumber Daya Air dan penataan ruang (%)	62,60 %
Sasaran 1			
1	Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana sumber daya air.	Persentase Kualitas sarana dan prasarana sumber daya air (%)	53,45 %
2	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR (%)	71,75 %
Tujuan 2			
	Meningkatkan tata kelola organisasi Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat (Angka)	80
Sasaran 2			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat (Angka)	80
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	72

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku	Rp. 123.230.122.000,-	APBD
2. Program Pengelolaan Sungai, Pantai, Dan Pengendalian Banjir	Rp. 83.898.458.000,-	APBD
3. Program Pengembangan Dan Pembinaan Teknis SDA	Rp. 17.001.269.000,-	APBD
4. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 3.815.000.000,-	APBD
5. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 18.220.880.000,-	APBD
6. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 975.000.000,-	APBD

Semarang, 7 Februari 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

GUBERNUR JAWA TENGAH



H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Pt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA BIDANG
SUNGAI, BENDUNGAN DAN PANTAI

Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1

Pembina Tingkat I

NIP. 19640601 199302 1 002

**PRESTASI
TAHUN 2019**

**DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG**

DIBIDANG SUMBER DAYA AIR

**PENERIMAAN PENGHARGAAN
TOP 99 INOVASI PELAYAN PUBLIK TAHUN 2019 (Aplikasi Pembagian Air Irigasi)
OLEH GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH**



PIAGAM & VANDEL PENGANUGERAHAN PERINGKAT I KIP AWARD 2019 SEBAGAI BADAN PUBLIK INFORMATIF OLEH KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH



PENERIMAAN PIAGAM PENGANUGERAHAN PERINGKAT I KIP AWARD 2019 SEBAGAI BADAN PUBLIK INFORMATIF OLEH KEPALA DINAS PU SDA TARU PROVINSI JAWA TENGAH

